

## **BAB II EKOWISATA**

### **2.1. Pariwisata Alam**

#### **2.1.1. Pariwisata**

Perkembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan peradaban manusia. Pariwisata muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Suwena & Widyatmaja (2017) menjelaskan bahwa setidaknya ada empat faktor utama yang menonjol dari pariwisata, yaitu:

- a. Perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sementara
- b. Perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain
- c. Bagaimanapun bentuknya, perjalanan tersebut harus berhubungan dengan rekreasi atau piknik.
- d. Tujuan perjalanan tersebut bukan untuk mencari pendapatan di lokasi tujuan wisata.

Dalam perkembangannya pariwisata berubah menjadi sesuatu yang kompleks dan melibatkan berbagai elemen kehidupan manusia sehingga membentuk sebuah sistem. Leiper (1979) mengartikan pariwisata sebagai suatu sistem yang berhubungan dengan perjalanan manusia dalam jangka waktu sementara dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan maksud untuk memperoleh kesenangan dari titik-titik perjalanan tersebut. Elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut adalah wisatawan, daerah asal wisatawan, tujuan wisata, rute perjalanan wisata serta industri wisata. Kelima elemen tersebut memiliki karakteristik masing-masing serta akan berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yaitu lingkungan fisik, aspek budaya, aspek ekonomi, sosial, politik, serta teknologi yang saling berinteraksi.

### **2.1.2. Wisata Alam**

Menurut *World Tourism Organization (WTO)*, mulai tahun 1990an kecenderungan masyarakat lebih memilih untuk berwisata kembali ke alam (Arida, 2017). Wisata Alam merupakan perjalanan wisatawan domestik maupun mancanegara untuk melihat atau menikmati ekosistem alami dan kehidupan liar dengan tujuan rekreasi maupun edukasi (HaySmith and Hunt, 1995). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dijelaskan bahwa pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Regulasi tersebut juga mengatur bahwa segala bentuk pengusahaan pariwisata alam harus memperhatikan konservasi sumber daya alam beserta ekosistem alaminya. Wisata berbasis alam mencakup beberapa bentuk wisata, yaitu wisata untuk menikmati kondisi alami alam (misalnya wisata petualangan), wisata alam yang berfokus pada elemen spesifik dari alam (misalnya kehidupan satwa liar, wisata bawah laut), serta wisata alam yang dikembangkan untuk konservasi sumber daya alam (taman nasional, suakamargasatwa dan sebagainya) (Hall and Boyd, 2005).

### **2.1.3. Pariwisata Berkelanjutan**

Selama periode 1990-an, terdapat perhatian serius dari dunia internasional terhadap pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari perhatian internasional tersebut adalah pembentukan European Environment Agency (1990), serta diadakannya *UN summit on the Environment and Development* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang menghasilkan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, Agenda 21 dan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Dalam dunia bisnis konsep pembangunan berkelanjutan digagas oleh Elkington dengan Konsep *Triple Bottom Line*. Elkington menjelaskan bahwa setiap strategi bisnis yang dijalankan harus mempertimbangkan 3P yaitu

*Planet* (Lingkungan), *People* (sosial), dan *Profit* (ekonomi). Manusia sebagai aktor utama dalam usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ketiga aspek tersebut dalam setiap aktivitas yang dijalankan (Elkington, 1997).

Sektor Pariwisata juga merupakan sektor yang tidak luput dari penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga muncul paradigma baru yang disebut pariwisata berkelanjutan. Menurut Weaver (2006) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar pariwisata dapat berkelanjutan, yaitu:

- a. Memanfaatkan semua sumber daya utama pariwisata secara optimal
- b. Menghargai budaya asli warga lokal, nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati
- c. Memastikan bahwa aktivitas pariwisata layak secara ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan secara merata serta pengentasan kemiskinan
- d. Menjaga kepuasan wisatawan, mempromosikan serta meningkatkan perhatian wisatawan mengenai praktek-praktek pariwisata berkelanjutan

Konsep pariwisata berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini konsep pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang berusaha memaksimalkan dampak positif dari pariwisata serta meminimalkan dampak negatif dari pariwisata itu sendiri sehingga masih dapat memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya (Seba, 2012).

#### **2.1.4. Ekowisata**

Salah satu bentuk implementasi konsep pariwisata berkelanjutan adalah dalam bentuk ekowisata. Ekowisata dapat memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat, dampak positif bagi lingkungan berupa konservasi serta manfaat sosial berupa pemberdayaan masyarakat dalam mengelola

ekowisata serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ekowisata sering dipandang sebagai model pariwisata yang paling cepat berkembang di dunia. Berbagai negara di dunia memandang bahwa ekowisata memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai alat pembangunan ekonomi serta perlindungan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang (Honey, 2008).

Ekowisata merupakan bentuk baru dari wisata yang memperhatikan berbagai aspek dalam pengelolaannya. Buckley (1994) menjelaskan bahwa mayoritas organisasi lingkungan hidup menyatakan bahwa suatu wisata dapat dikategorikan sebagai ekowisata jika wisata tersebut berbasis pada alam, dikelola dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, pro terhadap konservasi alam, serta memberikan pengajaran untuk peduli pada lingkungan. *The International Ecotourism Society (TIES)* mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah yang masih alami untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Arlym and Hermon, 2019). Berdasarkan definisi tersebut, maka setidaknya terdapat tiga esensi utama ekowisata yaitu :

- a. Melindungi dan melestarikan lingkungan;
- b. Menghargai kebudayaan lokal serta memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat setempat; dan
- c. Memberikan pembelajaran sekaligus perjalanan yang menyenangkan bagi wisatawan.

Pada perkembangannya prinsip-prinsip ekowisata berevolusi menyesuaikan kondisi lingkungan serta dinamika masyarakat, sehingga pada tahun 2000an terdapat lima prinsip yang harus dimiliki oleh ekowisata, yaitu:

- a. Konservasi lingkungan;
- b. Preservasi budaya;
- c. Partisipasi masyarakat lokal;
- d. Manfaat ekonomi; dan
- e. Pemberdayaan kelompok masyarakat.

.Interpretasi dari prinsip-prinsip ekowisata tersebut hadir menjadi sebuah solusi berbagai masalah di sektor pariwisata, pengembangan ekonomi, konservasi lingkungan, pengentasan kemiskinan serta pelestarian budaya lokal (Cobbinah, 2015).

#### **2.1.5. Kelebihan Ekowisata**

Kelebihan ekowisata dibandingkan dengan bentuk wisata lain adalah ekowisata merupakan jenis wisata yang paling murah karena hanya menjual “rasa” kepada para pengunjung/wisatawan (Tuwo, 2011). Pesona dari ekowisata membuat para wisatawan rela untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga untuk memperoleh “rasa” tersebut. Kelebihan lain dari ekowisata ini adalah adanya *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lain jika dikelola dengan baik. Dengan berkembangnya ekowisata, maka sektor lain seperti transportasi, akomodasi, dan ekonomi akan ikut bergeliat. Sebagai gambaran, ekowisata pesisir dan laut di Jamaika dapat mendatangkan devisa lebih dari US\$ 90 milyar per tahun (Tuwo, 2011). Indonesia sebagai negara dengan keindahan alam yang lengkap, dari pantai sampai pegunungan tentunya memiliki potensi yang lebih besar untuk mengembangkan ekowisata.

Ekowisata juga merupakan bentuk pariwisata yang sejalan dengan paradigma *Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama *goal* kedelapan yaitu tersedianya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta *goal* kelima belas yaitu terpeliharanya ekosistem daratan. *Goal* kedelapan dapat diwujudkan, dengan pengelolaan ekowisata yang profesional sehingga akan banyak wisatawan yang berkunjung dan otomatis membuka berbagai lapangan kerja seperti penyedia transportasi, usaha kuliner, penyediaan hotel/akomodasi, biro wisata dan lain sebagainya. *Goal* kelima belas dapat diwujudkan, karena ekowisata merupakan wisata yang sangat memperhatikan unsur konservasi. Dengan adanya masyarakat lokal yang bergantung mata pencahariannya kepada ekowisata, maka rasa ikut memiliki terhadap ekowisata semakin tinggi sehingga masyarakat akan ikut menjaga dan merawat ekowisata tersebut. Menurut Tuwo (2011) terdapat tiga manfaat sekaligus yang diperoleh jika Pemerintah dan masyarakat dapat mengelola

ekowisata dengan baik, yaitu kelestarian sumber daya alam akan terjaga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta yang terakhir adalah Pemerintah tidak perlu menganggarkan biaya untuk konservasi lingkungan, karena masyarakat akan dengan sukarela menjaga kelestariannya.

## **2.2. Stakeholder Ekowisata**

Kegiatan pengelolaan serta pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilepaskan dari peranan *stakeholder* pariwisata. *Stakeholder* pariwisata meliputi tiga pihak, yaitu : Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, dengan fungsi dan peranannya masing-masing (Rahim, 2012). Fungsi dan peranan masing-masing *stakeholder* adalah sebagai berikut:

### **a. Pemerintah**

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan harus berperan sebagai regulator yang membuat peraturan di bidang pariwisata serta fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata. Pemerintah harus menciptakan regulasi yang mendukung iklim investasi di sektor pariwisata. Selain itu, sarana dan prasarana pariwisata harus memadai sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata.

### **b. Swasta (pelaku usaha/industri pariwisata)**

Pihak swasta memiliki modal, sumber daya, serta jaringan bisnis yang dimilikinya berperan sebagai pelaku serta pengembang berbagai aktivitas usaha. Sektor swasta dengan berbagai sumber daya yang dimiliki dapat mengembangkan sektor penunjang pariwisata seperti transportasi, perhotelan dan lain sebagainya.

### **c. Masyarakat**

Masyarakat pada hakikatnya merupakan tuan rumah (*host*) dari industri pariwisata itu sendiri. Masyarakat memiliki sumber daya berupa adat istiadat, budaya, serta kearifan lokal yang dapat menjadi nilai tambah pada industri pariwisata. Selain sebagai *host*, masyarakat juga berperan sebagai aktor dalam pengembangan industri pariwisata.

### **2.3. Ekowisata Berbasis Masyarakat**

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan bentuk ekowisata yang dikembangkan, dioperasikan, dikelola serta memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat lokal (Mohd Noh *et al.*, 2020). Keterlibatan masyarakat sekitar dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, misalkan adanya musyawarah dengan masyarakat lokal serta memastikan masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan ekowisata baik sebagian atau seluruhnya (Kiss, 2004). Ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu pariwisata berbasis masyarakat yang banyak digunakan sebagai media untuk konservasi lingkungan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Ekowisata bergantung pada atraksi yang menarik yang disediakan oleh alam. Ekowisata berbasis masyarakat menghasilkan pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk konservasi serta sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar sekaligus mengalihkan perilaku masyarakat yang dahulunya mencari pendapatan dari mengeksploitasi alam beralih menjadi memelihara alam sebagai sumber pendapatan (Kiss, 2004).

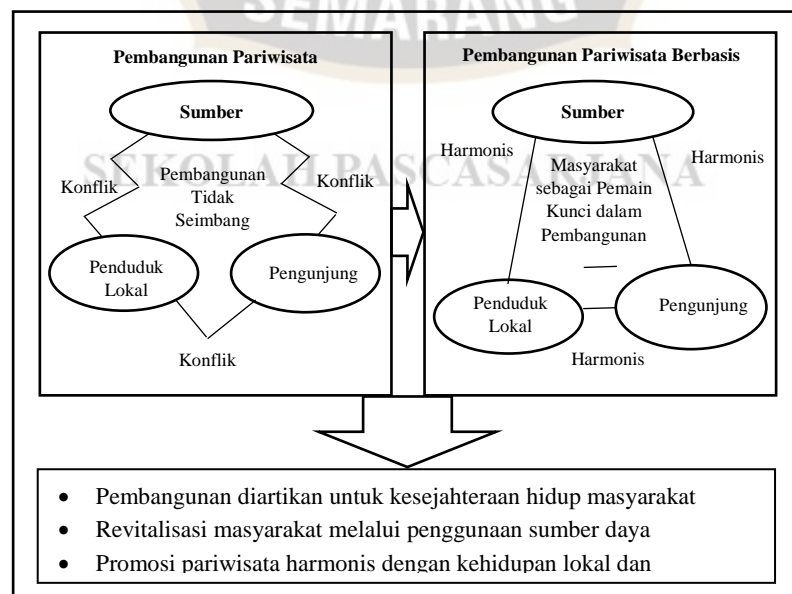
Menurut Prasiana (2013) kunci utama pariwisata berbasis masyarakat adalah (1) keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan, (2) sumber daya, dan (3) kepuasan wisatawan yang diciptakan oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat juga membawa banyak keuntungan. Keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Semakin luasnya kesempatan usaha;
- b. Semakin luasnya lapangan kerja;
- c. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah;
- d. Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
- e. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup;
- f. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban;
- g. Mendorong peningkatan dan pertumbuhan dalam bidang pengembangan sektor lainnya;
- h. Memperluas wawasan nusantara serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Melihat dari besarnya manfaat yang didapatkan, pengembangan pariwisata dengan melibatkan serta memberdayakan masyarakat lokal perlu dilaksanakan dalam pembangunan destinasi wisata. Menurut Prasiana (2013) Dari perspektif pariwisata, pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan akses informasi
- b. Membuka akses pemasaran produk yang dihasilkan dari usaha masyarakat lokal
- c. Revitalisasi potensi dan peran masyarakat, termasuk revitalisasi pranata masyarakat
- d. Menghilangkan diskriminasi gender dalam bidang pariwisata
- e. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya lokal
- f. Melindungi usaha dan ekonomi masyarakat lokal
- g. Terjalinnnya kemiraan antara para *stakeholder* pariwisata

Pariwisata berbasis masyarakat bertumpu pada masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara seimbang serta adanya mitigasi konflik dalam pengembangan destinasi wisata. Hal tersebut merupakan perubahan konsep dari pembangunan pariwisata konvensional dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan pariwisata, seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.1. Konsep Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat  
Sumber : Prasiana (2013)



Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan destinasi pariwisata berkelanjutan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengatur tentang kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa secara garis besar terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu destinasi wisata agar dapat dikategorikan sebagai destinasi wisata berkelanjutan, yaitu:

- a. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
- c. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan
- d. Pelestarian lingkungan.

Keempat kriteria tersebut sangat sejalan dengan model pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, yang memiliki prinsip pemberdayaan masyarakat, menghargai budaya dan adat setempat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu *best practice* penerapan ekowisata berbasis masyarakat adalah pengelolaan ekowisata terumbu karang di kawasan Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Ekowisata terumbu karang di Desa Pemuteran berhasil memadukan aspek konservasi dengan aspek ekonomi dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Desa Pemuteran membentuk lembaga bernama Pecalang Segara yang bertugas mengawasi dan mencegah terjadinya eksploitasi terumbu karang. Ekowisata berbasis masyarakat ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat yang dahulunya mengeksploitasi sumber daya laut melalui cara-cara yang destruktif (misalnya dengan bom, potas dan lain sebagainya), sekarang masyarakat justru menjaga ekosistem laut yang merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial. Terjadi transformasi ekonomi di masyarakat, yang dahulunya hanya menggantungkan ekonomi mereka dari menangkap ikan menjadi berkembang ikut terlibat pada industri pariwisata (menjadi pemandu wisata, pemandu selam, membuka *homestay*, membuka warung makan dan sebagainya). Kunci Keberhasilan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Pemuteran adalah adanya partisipasi masyarakat dalam setiap program yang

dijalankan serta adanya penyesuaian terhadap nilai dan budaya yang hidup di masyarakat (Diarta, 2015).

#### **2.4. Potensi Wisata**

Potensi wisata merupakan keunikan, keindahan, dan keanekaragaman alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu tempat wisata (Kuntarto and Murnisari, 2016). Potensi wisata banyak dibahas pada kajian pengembangan pariwisata. Buhalis (2000) memperkenalkan konsep 6A dalam pengembangan potensi wisata yaitu *attractions* (atraksi wisata), *amenities* (fasilitas), *accessibility* (aksesibilitas), *activities* (aktivitas wisata), *available packages* (paket layanan wisata yang tersedia), dan *ancillary services* (layanan tambahan lainnya). Potensi wisata yang kuat dan digemari oleh wisatawan akan menjadi modal utama dalam mengembangkan destinasi wisata. Persepsi wisatawan atas suatu destinasi wisata akan sangat berpengaruh terhadap jumlah wisatawan maupun wisatawan potensial yang akan mengunjungi obyek wisata tersebut.

Dua aspek utama terkait persepsi wisatawan terhadap potensi wisata adalah sapta pesona serta fasilitas dan aksesibilitas (Sotyadarpita and Rofi, 2013). Sapta pesona pertama kali dicetuskan oleh Soesilo Soedarman (Menparpostel) yang meliputi tujuh unsur yang harus dimiliki oleh destinasi wisata agar dapat menarik minat wisatawan. Ketujuh unsur sapta pesona tersebut adalah aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Ketujuh unsur tersebut harus dimiliki oleh destinasi wisata serta dihayati oleh masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) dari pariwisata tersebut. Sedangkan fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana di dalam kawasan maupun di sekitar obyek wisata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Aksesibilitas berkaitan dengan tingkat kemudahan untuk menjangkau suatu destinasi wisata (Sumarabawa, Wesnawa and Astawa, 2015). Aksesibilitas merupakan salah satu unsur penting dalam pariwisata, karena merupakan pendorong bagi wisatawan potensial menjadi wisatawan nyata. Aksesibilitas yang baik meliputi tersedianya petunjuk dan rambu-rambu menuju destinasi wisata, kondisi jalan yang baik, serta

kemudahan mencapai destinasi wisata (Handayani, Khairiyansyah and Wahyudin, 2019)

## **2.5. Prinsip Dasar Ekologi dalam Pengelolaan Berkelanjutan**

### **2.5.1. Prinsip Dasar Keseimbangan Ekologi**

Pentingnya memperhatikan prinsip ekologi dalam pengelolaan berkelanjutan didasarkan pertimbangan bahwa sebuah ekosistem terdiri dari berbagai unsur biotik dan abiotik yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem tersebut terdiri dari siklus energi, rantai makanan, serta organisme hidup yang merupakan faktor utama dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan (Tuwo, 2011). Interaksi antara komponen biotik dan abiotik secara alami akan seimbang. Namun, keseimbangan tersebut akan terjaga tergantung pada kepentingan manusia, karena pada hakekatnya pengelolaan lingkungan hidup akan bersifat *antropocentris*. Selama manusia dapat mengelola ekosistem dengan baik serta tidak melakukan *over* eksploitasi, maka keseimbangan tersebut akan dapat pulih dengan sendirinya (Siahaan, 2004).

Pada dasarnya suatu ekosistem secara alami memiliki *ecological resilience* atau daya lenting, yaitu kemampuan ekosistem untuk bertahan dan memulihkan diri ke dalam kondisi keseimbangannya apabila ekosistem tersebut mengalami kerusakan atau degradasi (Gunderson, 2000). Konsep ketahanan ekologi salah satunya dicetuskan oleh Holling (1973). Holling mendefinisikan ketahanan ekologi sebagai jumlah gangguan yang dapat ditahan suatu ekosistem sebelum hubungan antara organisme (predator dan mangsanya, herbivora dan sumber makanannya, atau spesies yang bersaing) menyebabkan kepunahan lokal dan sebagai akibatnya menyebabkan ekosistem beralih ke keadaan lain. Oleh karena itu, teori "*Holling Sustainability*" menyatakan bahwa suatu ekosistem dapat *sustainable* apabila ekosistem tersebut dapat menjaga pola hubungan interaksi antar spesies yang terkait dari waktu ke waktu dengan cara beradaptasi atas tekanan yang menerpanya (Common and Perrings, 1992). Suatu ekosistem dapat kembali kepada titik keseimbangannya, apabila degradasi/kerusakan yang terjadi tidak melebihi daya lenting dari ekosistem tersebut (Tamin, Ulfa and Saleh, 2021).

### 2.5.2. Daya Dukung Lingkungan

Konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia di alam dilakukan dengan bertanggung jawab serta menghindari *over* eksploitasi. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyokong peri kehidupan manusia, makhluk hidup selain manusia, serta keselarasan antar keduanya (KLHK, 2015). Konsep daya dukung muncul karena kekhawatiran terhadap tingkah laku manusia yang cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang sifatnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Salah satu tulisan ilmiah yang paling populer membahas tentang kontradiksi pemanfaatan sumber daya alam adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hardin (1968) dengan judul “*Tragedy of the Commons*”. Tulisan tersebut muncul seiring fenomena manusia yang cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang hakikatnya merupakan milik bersama untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga dapat merugikan makhluk hidup lain. Ide pada tulisan “*Tragedy of the Commons*” didasarkan pada asumsi, baik eksplisit atau implisit, bahwa terdapat batasan lingkungan untuk populasi dan pertumbuhan. Lebih khusus lagi, kekhawatiran atas asumsi bahwa meningkatnya eksploitasi sumber daya akan menyebabkan degradasi lingkungan dan sosial dan pada akhirnya dapat merusak lingkungan alam yang merupakan pendukung peri kehidupan. Dalam terminologi teknis konsep daya dukung menjadi salah satu hal yang ditawarkan untuk mengatasi isu tersebut serta merupakan salah satu gagasan penting dalam manajemen lingkungan (Manning, 2007).

Konsep daya dukung muncul sebagai salah satu solusi untuk memberikan batasan kepada manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga tidak terjadi degradasi lingkungan dan keseimbangan ekologi dapat tetap terjaga. Menurut Sinery et al. (2019), implementasi konsep daya dukung lingkungan, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Penyusunan daya dukung pada level minimum sebagai aktivitas baru yang diakomodir sebelum terjadinya perubahan yang nyata pada rona lingkungan.

- b. Perubahan-perubahan pada lingkungan diizinkan, tetapi dibatasi pada tingkat tertentu sehingga tidak menimbulkan degradasi lingkungan serta tidak melebihi standar atau baku mutu yang telah ditetapkan.
- c. Kapasitas lingkungan diterima sebagai sebuah aktivitas yang baru, serta dipakai dalam pengembangan model manajemen sumber daya.

Pada sektor pariwisata, daya dukung merujuk pada batasan jumlah pengunjung yang dapat memasuki suatu kawasan untuk menikmati berbagai aktivitas wisata. Batasan tersebut diformulasikan untuk mengintegrasikan gagasan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata (Lagmoj *et al.*, 2013). Batasan tersebut merupakan nilai limit dimana wisatawan masih dapat memperoleh kepuasan dari obyek wisata, tetapi tidak menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.

## **2.6. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata**

Menurut Zaenuri (2012) bahwa dalam mengelola dan mengembangkan wisata lokal agar dapat selaras dengan perencanaan pembangunan di sektor lain, perlu dilakukan beberapa pendekatan yang holistik meliputi beberapa pendekatan perencanaan, yaitu:

### **a. Pendekatan Perencanaan Terpadu**

Pariwisata merupakan sektor yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak sehingga memerlukan perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan kepastian kepada Pemerintah, masyarakat, serta pelaku industri pariwisata. Perencanaan terpadu seperti ini sering disebut dengan istilah *top down and bottom up planning*.

### **b. Pendekatan Keterpaduan Permintaan dan Penawaran**

Dalam pendekatan ini lebih ditekankan pada upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata. Pendekatan ini berorientasi pada keseimbangan antara jumlah *demand* atau permintaan (jumlah wisatawan) serta jumlah penawaran atau layanan wisata yang ditawarkan pada objek wisata.

### **c. Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Pariwisata akan membawa pengaruh terhadap daerah di sekitar objek wisata, baik pengaruh langsung, tidak langsung, maupun efek ikutan. Oleh karena itu,

perlu penyiapan tata ruang yang komprehensif dan partisipasi masyarakat agar pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.

**d. Pendekatan Pengembangan Wilayah**

Orientasi dari pendekatan ini adalah pengembangan wilayah di sekitar objek wisata. Pariwisata merupakan sektor yang pasti memberikan pengaruh pada daerah sekitarnya, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Jika obyek wisata tersebut memberikan pengaruh positif, maka daerah sekitarnya akan berkembang dan menjadi daerah maju. Akan tetapi, jika obyek wisata tersebut membawa pengaruh yang negative, maka akan menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan di wilayahnya.

**e. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, bukan sekedar kegiatan dengan obyek utama industri pelayanan yang melibatkan manajemen produk dan pasar, tetapi juga merupakan proses dialog antara wisatawan sebagai *guest* dan masyarakat setempat sebagai *host*. Pengembangan suatu lokasi komunitas tertentu sebagai tempat tujuan wisata, karena sumberdaya utamanya adalah masyarakat secara fisik dan sosial budaya, maka perlu melibatkan masyarakat dalam hal ini seniman, swasta, dan budayawan sebagai sumber daya untuk berlaku bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang berkembang dinamis.

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan ekowisata. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan strategi adalah SWOT. SWOT dilakukan dengan identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) sebagai bahan untuk menyusun alternatif strategi. Alternatif strategi tersebut kemudian dapat dipilih berdasarkan kondisi organisasi saat ini.

## 2.7. Sintesa Literatur

Berdasarkan teori dan literatur yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirangkum ke dalam sintesa literatur sebagai berikut.

Tabel 2.1. Sintesa Literatur

| No. | Teori/Literatur                   | Definisi atau Unsur Utama   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1.  | Ekowisata                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke alam yang bertanggung jawab dengan tujuan menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi.</li> <li>- ekowisata mempunyai lima prinsip, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Konservasi lingkungan;</li> <li>b) Preservasi budaya;</li> <li>c) Partisipasi masyarakat lokal;</li> <li>d) Manfaat ekonomi; dan</li> <li>e) Pemberdayaan kelompok masyarakat.</li> </ol> </li> </ul> |
| 2.  | Potensi Wisata                    | Dua aspek utama yang dapat mewakili potensi wisata adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapta pesona</li> <li>- Fasilitas dan aksesibilitas</li> </ul>  |
| 3.  | Partisipasi masyarakat            | Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan, yang bisa diukur dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan</li> <li>- Adanya keterlibatan masyarakat dalam implementasi program</li> <li>- Masyarakat ikut menikmati hasil pembangunan</li> <li>- Keterlibatan masyarakat dalam implementasi program</li> </ul>  |
| 4.  | Daya Dukung Lingkungan            | Daya dukung lingkungan terbagi menjadi tiga yaitu daya dukung fisik, riil, dan efektif. Kaitannya dengan obyek wisata, daya dukung merupakan kapasitas maksimal oleh suatu obyek wisata yang masih dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan tanpa menimbulkan degradasi lingkungan. Daya dukung lingkungan terbagi menjadi tiga, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya dukung fisik</li> <li>- Daya dukung riil</li> <li>- Daya dukung efektif</li> </ul>  |
| 5.  | Kelayakan ekowisata               | Kondisi eksisting sebuah lokasi untuk dapat dikembangkan menjadi sebuah ekowisata, yang dapat diukur berdasarkan daya tarik wisata, aksesibilitas serta sarana dan prasarana  |
| 6.  | Efektivitas pengelolaan ekowisata | Indikator pengelolaan yang mengukur bagaimana sumber daya yang telah dihabiskan untuk mengelola ekowisata dapat menghasilkan output serta berdampak pada pencapaian tujuan pengelolaan ekowisata  |
| 7.  | Strategi Pengelolaan ekowisata    | Arahan pengelolaan ekowisata yang dirumuskan berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang dapat dijadikan pedoman bagi pengelola dalam mengelola ekowisata   |